

# Agama, Kekerasan dan Homogenisasi Kultural

Sholeh UG<sup>\*)</sup>

## Pendabuluan

Berbagai peristiwa kerusuhan sejak tahun 1998 hingga sekarang, menghentak dan merobek nurani kesadaran kita. Indonesia yang dikenal dengan bangsa santun dan beragama, tiba-tiba menjadi bangsa yang beringas, kejam, dan tak berperikemanusiaan. Toleransi antar suku, umat beragama menjadi pudar, dan kita, anak bangsa, menarik garis batas secara tegas, kawan atau lawan, benar atau salah. Parameter untuk mengklasifikasikan batas tersebut *absurd*, dan terkadang ceroboh.

Sangat naif jika kita menempatkan berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998 sebagai *religious hatred*. Sama gegabahnya laporan dalam Sidang Raya Dewan Gereja Sedunia (SRDGS), yang menempatkan Indonesia dalam urutan pertama negara dengan hubungan agama terburuk. Pendapat mengenai kerusuhan rasial dan religius serta laporan SRDGS, bisa jadi merupakan *mainstream* yang dipaksakan untuk diterima.

Lance Castles<sup>1</sup> justru mempertanyakan *mainstream* tersebut. Jika batas-batas yang ada

antar umat ber-agama dipolitikkan, maka potensi tragedi akan terjadi amat mengerikan. Castles memiliki catatan, kerusuhan antaragama yang terjadi di Indonesia sejak 1998 mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sejak tahun 1996 serangan atas gereja mencapai 16 kasus perbulan, sedang pasca Soeharto, kerusuhan turun hingga 6,3 kasus per bulan<sup>2</sup>. Bisa juga ditambahkan, penyerangan terhadap masjid seperti terjadi di Timor-Timur.

Castles yakin di Indonesia ada kedewasaan pluralitas agama yang telah terjalin cukup lama. Dengan asumsi itu dapat disimpulkan berbagai kerusuhan yang terjadi sesungguhnya bukan dipicu oleh sentimen keagamaan, melainkan akumulasi berbagai kejenuhan masyarakat akibat KKN, arogansi serta ketidakadilan ekonomi-politik. Kerusuhanyang berkecamuk bukan merupakan indikasi telah terjadi *leap of faith*, orang tiba-tiba melakukan justifikasi religius pada sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan rasio, tapi perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan yang selama ini terjadi.

Kejenuhan masyarakat akibat ketimpangan struktur sosial merupakan motif dominan pemicu berbagai kerusuhan. Ketimpangan struktur sosial terjadi ketika dipaksakan homogenisasi kultural dari penguasa. Sedang ketimpangan struktur

<sup>\*)</sup> Soleh UG, SH.adalah Direktur Lembaga Kajian Prospek Yogyakarta.

ekonomi terjadi karena redistribusi yang dirasa kurang adil antara pusat dan daerah, akibat sentralisasi kekuasaan. Praktek KKN yang berlangsung hampir di segala sektor menimbulkan kekecewaan, karena akibat KKN beberapa orang yang dekat dengan kekuasaan memperoleh akses ekonomi yang lebih baik dibanding mereka yang jauh dari pusaran kekuasaan. Kemakmuran yang diperoleh etnis pendatang (nonpri) menimbulkan kecemburuan, khusus untuk etnis nonpri, kecemburuan sebenarnya ditujukan pada kebijakan pemerintah yang banyak memberi kemudahan pada mereka. Pada masa Orde Baru hanya kurang dari 10% 'kue pembangunan' yang dinikmati masyarakat menengah ke bawah yang berjumlah 80%, sedang 90% dinikmati oleh penguasa, keluarga dan kroni-kroninya yang hanya 10% dari jumlah seluruh rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Kondisi itu semakin diperburuk oleh arogansi dari pejabat pemerintah, partai pemerintah, dan semua yang dekat dengan kekuasaan. Pada masa Orde Baru aparat pemerintah dan partai pemerintah sering bersikap arogan. Pejabat pemerintah menganggap diri sebagai 'tuan', bukan pelayanan masyarakat, memunculkan stigma arogansi merupakan simbolisasi kekuasaan. Partai pemerintah (Golkar) dalam beberapa kali Pemilu sering berlaku adigang-adigung-adiguna, kasus kuningisasi di Jawa Tengah, dan pernyataan R. Hartono ketika menjabat KSAD bahwa setiap prajurit ABRI adalah kader Golkar, merupakan sebagian contoh bagian arogansi partai pemerintah membuat banyak pihak sakit hati. Sikap oposan yang disembunyikan akan muncul secara radikal ketika satu kelompok masyarakat melihat kelompok atau golongan lain berlaku arogan. 'Pemberontakan' atau perlawanan terhadap arogansi dianggap sikap beroposisi pada penguasa, hal ini bisa dilihat dari bentrokan antar

OPP ketika kampanye.<sup>4</sup> Termasuk pengrusakan yang terjadi ketika perjuangan reformasi bergulir, sebagian besar yang dirusak adalah simbol-simbol kekuasaan (kantor polisi) dan simbol ketidakadilan ekonomi (kantor bank, show room mobil). Beberapa amuk massa yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini, selain merusak kantor polisi juga balai desa, gedung DPRD, dan kantor-kantor pemerintah lain.

Dari berbagai kerusuhan tersebut praktis tidak ada seseorang dibunuh hanya karena beragama Kristen atau Islam. Kerusuhan dan pembunuhan terjadi karena ketimpangan ekonomi, konflik pribumi dan non pribumi (baik etnis Cina, maupun pendatang dan penduduk asli). Kasus Ambon dan Sambas (Kalimantan Barat) memperkuat premis tersebut. Di Ambon konflik terjadi antara penduduk asli dengan pendatang dari Sulawesi. Di Sambas antara warga Melayu dengan warga pendatang dari Madura. Politisasi agama terjadi ketika dua suku atau golongan yang berhadapan berbeda agama. Kasus Ambon sebagai contoh, ketika kerusuhan berlarut-larut, tidak segera diselesaikan, agama dipolitisasi untuk memperkeruh suasana, kondisi itu bisa ditengarai sebagai usaha dari pihak tertentu untuk memancing di air keruh demi kepentingan politik. Agama hanya dipakai sebagai medium politik, yaitu untuk menggapai kekuasaan bagi segelintir orang. Legalistik-Formalistik.

Kesan kerusuhan yang terjadi merupakan konflik agama sengaja dipaksakan, karena proses penanganannya yang lamban. Agama hanya dijadikan tameng untuk mengaburkan fakta. Asumsi itu berdasar pengamatan bahwa selama ini proses interaksi agama di Indonesia berjalan dengan baik, walaupun ada gerakan dari penganut agama tertentu sebenarnya hanya merupakan rekayasa penguasa untuk memunculkan momok di tengah masyarakat. Gerakan-

gerakan –yang sengaja diciptakan itu– hanya berskala kecil dan lokal sifatnya, tidak massal seperti gerakan fis Di Aljazair, atau gerakan umat Islam di wilayah Indonesia yang melahirkan Pakistan.

Walau kerukunan antarumat beragama sudah terjalin dengan baik, namun tokoh-tokoh agama masih berharap hubungan yang harmonis itu ditingkatkan dan disinergikan bagi pembangunan. Awal tahun 80-an terjadi semangat antarumat beragama di Indonesia untuk membangun kebersamaan dengan mengadakan forum-forum dialog antar keyakinan. Muncul suatu wacana untuk mencari kesamaan spirit agama demi membangun dialog yang intensif antar pemeluk agama. Mereka menyadari kecurigaan antar pemeluk agama hanya merupakan hambatan proses pembangunan. Dialog teologis tersebut menghasilkan suatu pandangan bahwa sebenarnya agama samawi (Islam, Kristen, Yahudi) memiliki kesamaan spirit, terutama dalam hal kasih-sayang, keadilan, egalitarian, saling menghormati, larangan membunuh tanpa hak, larangan mencuri, dan berbagai ajaran etika dan moral lainnya. Ajaran etik-moral sosial tersebut merupakan cerminan penghambaan manusia pada Allah, Tuhan. Secara lebih sederhana sering dikatakan, semakin tinggi penghambaan seseorang pada Tuhan, semakin tinggi pula perilaku sosialnya.<sup>5</sup> Bahkan orang yang hanya melakukan ibadah pada Tuhan dengan mengalienasi diri, dikatakan tidak sempurna iman.

Pesan moral Islam yang paling substansial adalah "Jangan membuat kerusakan dimuka bumi." Makna muka bumi adalah sesuatu yang berada, hidup, dan berkembang di atas, menempel dan di dalam bumi (tanah). Pesan moral itu bila diterjemahkan menjadi batasan perilaku agarkita tidak membunuh manusia,

hewan dan tumbuhan tanpa alasan yang hak (benar). Jika terpaksa membunuh dipersyaratkan untuk tidak berlebih-lebihan dan dengan cara yang baik (agar yang dibunuh tidak menderita terlalu lama, hewan misalkan). Dalam pepengajaranpun Islam mengajarkan agar tidak membunuh orang tua, kaum perempuan dan anak-anak, mereka yang sudah menyerah, bahkan dilarang merusak tanaman dan bangunan.

Dalam interaksi antaragama, Al-Qur'an sebagai sumber ajaran etik-moral, secara eksplisit mengakui keberadaan agama samawi lain, dan menempatkan Islam pada posisi penyempurna agama samawi sebelumnya. Agama-agama samawi sebelum Islam identik dengan ajaran Islam, perbedaan hanya terletak pada segi geografis dan temporal. Jika agama samawi sebelumnya berlaku untuk umat tertentu dalam waktu tertentu, Islam lahir untuk seluruh umat sepanjang masa.

Pelaksanaan pesan moral dan etika agama akan melahirkan ketenangan dan kedamaian hati, serta mendorong ke arah kehidupan sosial yang lebih baik.<sup>6</sup> Ingat Allah, pengabdian diri pada Tuhan tidak hanya bermakna imanent tapi juga transenden. Kepuasan batin karena melaksanakan ajaran agama itulah yang menjadi spirit kehidupan.

Makna spiritualitas agama tersebut, juga ditemui dalam agama samawi lainnya, seperti sudah diurai di atas. Jika Islam begitu sempurna mengajarkan cinta kasih, dalam agama nasrani juga dikenal ajaran serupa "Jika pipi kirimu ditampar, berikan pipi kananmu." Secara teologis, tidak ada perbedaan prinsip dalam agama-agama samawi, karena mereka berasal dari asal yang satu, Allah. Namun pengetahuan yang tepat tentang ajaran (agama) tidak menjamin pelaksanaan yang tepat. Pada tingkat pelaksanaan itu diperlukan pengetahuan yang tepat tentang

lingkungan sosial-budaya yang bersangkutan.<sup>7</sup> Rasulullah telah menunjukkan bagaimana pelaksanaan ajaran agama yang dipadukan dengan pengetahuan yang tepat akan lingkungan sosial dalam konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah merupakan *grand norma* masyarakat Madani. Yahudi, Muslim dan Nasrani bisa hidup rukun-damai. Semangat pluralisme tersebut, menurut Nurcholish Madjid, merupakan salah satu nilai keislaman yang sangat tinggi, dan salah satu ajaran pokok Islam.<sup>8</sup>

Semangat keberagaman seperti itu melahirkan sikap toleransi. Konflik antaragama akan terjadi ketika agama dipahami secara struktur, hitam-putih, agama dipahami secara normatif, apa yang seharusnya, bukan apa yang mungkin. Pemahaman formalitas agama menjadikan adanya struktur antara kiai, ulama, pendeta, pastur dan ummat, atau antara gembala dan penggembala. Pemimpin (ulama, pendeta, pastor, biksu) seolah memiliki legalitas formal mewakili Tuhan untuk menentukan baik-buruk, benar-salah perbuatan seseorang, sekaligus menentukan hukuman. Ajaran agama dipahami dalam makna eskatologis, diterjemahkan dengan makna jihad, memerangi kekafiran, menarik batas tegas antara kita dan mereka, kita yang benar mereka salah, kesalahan harus diluruskan dan seterusnya.

Pemahaman legalistik-formalistik dan normatif seperti itu, menggeser makna spiritualitas agama. Pelaksanaan ajaran agama hanya menjadi rutinitas –karena ada ancaman sanksi berupa dosa– hingga kering makna spiritual. Sebagai perbandingan, menonton sepak bola bagi orang Italia, dapat memenuhi dahaga spiritualitas, demikian juga menonton tinju, basket atau base ball bagi orang Amerika. Sedang bagi orang beragama, apakah dengan datang ke tempat ibadah dan melakukan ibadah ritual bisa

memenuhi kebutuhan spiritualitasnya? Hal itu yang perlu dicermati, karena penulisi khawatir ibadah dan datang ke tempat ibadah merupakan simbol seseorang memeluk agama, apalagi di Indonesia jika seseorang tidak beribadah dianggap tidak bertuhan dan dicap komunis. Beribadah hanya untuk menyelamatkan diri atau untuk mendudukkan diri selaras dengan lingkungannya, sedang kebutuhan spiritualitasnya tidak terpenuhi, atau terpenuhi dengan cara atau di tempat lain. Pemahaman agama yang legalistik-formalistik dan normatif membuat isu agama mudah menumbuhkan empati dan solidaritas sesama. Isu ketimpangan ekonomi yang diberi muatan agama akan mudah meledak dan mengesankan konflik antarumat beragama. Dalam perang antarnegara pun, faktor dominan adalah kepentingan material, namun kemudian diberi alasan agama.<sup>9</sup> Kondisi itulah yang membuat terjadinya *War Religious*, dari Perang Salib, sehingga perang di India antara Hindu dan Islam, Srilanka, Sarajevo dan sebagainya. Ironisnya dalam perang agama tersebut, 'Tuhan' berada di ujung pedang.

Kegagalan memahami ajaran agama secara benar bukan hanya melahirkan perang antar dua agama yang berbeda, juga intern umat beragama, sebutlah perang Iran-Irak, Orang Budhis Birma dengan Siam, juga di Kamboja, Orang Budhis Siam dengan Laos.<sup>10</sup> Hingga wajar ada yang meragukan peran agama dalam menciptakan tatanan kehidupan yang damai. Karena sesama penganut agama bisa bertikai dengan dalih membela agama.

Penghayatan spiritualitas agama menjadi stimulus pemeluknya untuk selalu menegaskan eksistensi sosiologis, sebagai sebuah tanggung jawab perjalanan eskatologis. Perilaku eskatologis jika hanya melahirkan alienasi a-la rahib, pertapa dan sejenisnya merupakan pemahaman

yang keliru. Karena ibadah seseorang di dunia diukur dengan amalan sosialnya.

## Motif Ekonomi

Secara normatif Islam dengan tegas mengajarkan pentingnya umat Islam memiliki asset ekonomi. Islam bukan hanya agama yang memusatkan diri pada keimanan terhadap Tuhan, tetapi mengarahkan perjuangannya untuk kemuliaan peradaban manusia.<sup>11</sup> Ajaran fundamental tentang hal itu dapat dilihat, misalnya, "kefakiran mendekatkan diri pada kekafiran." Kafir bukan hanya berarti tidak beragama tauhid (Islam), tapi lebih luas diterjemahkan sebagai melakukan pelanggaran syariat, seperti mencuri, merampok dan sebagainya. Batasan tersebut digariskan sebagai upaya untuk mewujudkan posisi tertinggi umat Islam (*khaira ummah*). Karena Islam telah melakukan revolusi besar dengan mengangkat manusia dari masyarakat jahiliah yang penuh keonaran, kesesatan, keterbelakangan dan kekejaman, pada tingkat kehidupan dengan keimanan yang kuat, akhlak yang mulia, ilmu pengetahuan yang luas dan persaudaraan yang mantap dalam persatuan.<sup>12</sup>

Kemiskinan akan mendorong seseorang bersikap irrasional, dan emosional. Kemiskinan bukan hanya diterjemahkan sebagai suatu bentuk kemalasan sehingga tidak bisa memperoleh penghasilan, tapi termasuk di dalamnya kemiskinan struktural, tertutupnya peluang dan potensi untuk mengembangkan diri sehingga gagal memperoleh penghidupan yang layak. Kemiskinan struktural itulah yang dominan memunculkan kerusuhan dan tindak kriminal lain di Indonesia. Sebagai contoh pada kerusuhan Mei 1998, banyak orang melakukan penjarahan, ketika ditanya apakah mereka tidak takut

ditembak? jawabnya cukup mengejutkan, kematian karena ditembak merupakan proses mempercepat dari kematian karena tidak mampu membeli kebutuhan hidup akibat krisis ekonomi.

Kemiskinan telah mengeringkan perasaan, sehingga hilang rasa malu dan takut. Jika kemiskinan tersebut masih bersifat personal, maka penanganannya masih mudah, tapi jika kemiskinan tersebut merupakan fenomena sosial, proses penanganannya cukup rumit. Banyaknya orang miskin di Indonesia (diperkirakan lebih dari seratus juta orang) menempatkan posisi negara ini dalam situasi rawan, menyimpan bom waktu yang setiap saat bisa meledak.

Rumitnya, agama yang sering disebut mampumenangkal kecenderungan negatif, tidak bisa berperan banyak karena telah direduksi menjadi pemahaman yang legalistik, formalistik dan normatif. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab berlarut-larutnya kerusuhan di Indonesia. Seseorang yang taat beragama pun, seringkali kalap dan hilang akal sehatnya, karena tekanan persoalan yang kompleks yang mendorongnya untuk bunuh diri.<sup>13</sup>

Kemiskinan, ketertindasan, ketidakmampuan untuk menentang kesewenang-wenangan, yang berlangsung terus-menerus mengendap dalam jiwa menjadi dendam. Dendam itu akan muncul dalam momentum yang tepat, dan paling mudah untuk dijadikan kambing hitam adalah agama.

## Agama dan Kekuasaan

Islam merupakan ajaran moral universal, karena itu ajaran Islam mudah berakulturasi dengan *neologisme* (paham baru). Prinsip tersebut menjadikan Islam memiliki *religious tolerance*. Pengalaman Islam masa lalu membuktikan hal tersebut. Islam yang muncul abad

VII Masehi hanya memerlukan waktu kurang dari 20 tahun untuk tampil ke permukaan dan memainkan peran strategis, karena Islam dengan ajaran moral universalnya mampu dan mudah berakulturasi. Berbeda dengan agama samawi lain yang dalam proses tumbuh dan berkembang, sering mengambil sikap oposisi dengan kekuasaan, menjadi simbolisasi perlawanan terhadap otoritarianisme penguasa ketika itu. Pada tahun 622 Masehi Islam terlibat secara intens dalam kehidupan politik di Madinah. Kenyataan ini membuktikan dalam ajaran Islam tidak dikenal garis pemisah antara Islam dan negara. Masyarakat Madinah merupakan prototype ideal kehidupan pluralistik, karena fase itu Nabi menerapkan ajaran moral universal seperti keadilan, egalitarian, supremasi hukum, dan jaminan keamanan serta perlindungan kelompok minoritas (Yahudi dan Kristen).

Masyarakat Madinah ketika itu merupakan gambaran ideal bangunan negara, sekaligus konsep ideal pelaksanaan ajaran Islam. Islam yang sarat dengan ajaran etika sosial diimplementasikan dalam heterogenitas masyarakat Madinah, dan menjadi tatanan hidup yang ideal. Nabi berhasil membangun harmoni antar etnis, dan agama, tanpa diskriminasi. Gambaran masyarakat seperti itu yang diadopsi dengan istilah masyarakat Madani, sebagai cita-cita ideal yang sepadan dengan *civil society*.

Di Indonesia, kita memiliki pengalaman cangkang mengenai pluralitas, pada proses awal kemerdekaan, beberapa orang utusan dari Indonesia Timur datang menemui Hatta yang mengancam akan memisahkan diri dengan Indonesia bila rumusan piagam Jakarta, khususnya kalimat "menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", tetap dipertahankan. Hatta, muslim-demokrat, akhirnya berhasil membujuk tokoh-tokoh Islam di BPUPKI untuk menga-

komodir usulan sebagian orang dari Indonesia Timur. Pertimbangan nasionalisme, dan sikap keberagamaan yang sempurna dari tokoh-tokoh Islam membuat kesatuan wilayah Indonesia dapat dipertahankan.

## Homogenitas Kultural

Semangat seperti itulah yang terus dipelihara hingga sekarang, walau ada upaya-upaya sistematis untuk meminimalisir peran politik Islam, baik pada masa Orde Lama maupun Orde Baru. Hubungan Islam dan negara di Indonesia seperti bermain layangan, terkadang ditarik, di saat lain diulur. Ada saat Islam berbulan madu dengan kekuasaan, tapi ada juga waktu ketika Islam menjaga jarak dengan kekuasaan.

Ganjalan sering terjadi ketika kekuasaan menciptakan mitos ekstrem kanan (GPK) dan melakukan penumpasan, seperti kasus Lampung, Tanjung Priok, Haur Koneng, kasus Imran, Komando Jihad dan sebagainya. Kasus-kasus itu tidak bisa dilihat sebagai gerakan agama, tapi merupakan ujud ketakutan pemerintah terhadap mitos yang diciptakannya sendiri. Dan kasus-kasus tersebut bukan dominasi 'Islam', tetapi kelompok-kelompok lain juga kerap membuat pemerintah geram, seperti Timor Timur, Irian Jaya, dan beberapa kasus lain. Berbagai peristiwa itu terjadi akibat homogenisasi yang dipaksakan oleh pemerintah.

Ketika Soekarno, dilanjutkan Soeharto memangku tampuk kekuasaan, keduanya memaksakan homogenisasi, bukan integrasi kultural. Homogenisasi merupakan proses *falltering out*, dominasi pihak yang kuat pada yang lemah. Indonesia dengan penduduk sekitar 200 juta, 13 ribu pulau dan lebih dari 200 etnik, kemajemukan agama serta tradisi, dipaksa untuk menerima keseragaman budaya. Proses itu

berarti menganggap tidak ada keragaman etnis, agama dan tradisi.

Memang beberapa saat, didukung kekuatan bersenjata, terbangun suatu harmoni. Namun harmoni tersebut hanya berada di permukaan. Pseudo harmoni itu menstimulus lahirnya gerakan sparatis (penegasan identitas) dari kelompok-kelompok yang ada, dan melahirkan disharmoni seperti saat ini.

Homogenisasi tidak berhasil karena masih terdapat perbedaan tahap kemajuan kultural antara satu kelompok atau daerah dengan lainnya. Ada kelompok atau daerah yang sudah sampai pada --mengikuti pembagian Alvin Toffler dalam *the third wave*-- gelombang ketiga yaitu masyarakat pasca industrial atau masyarakat informasi, tapi ada yang baru berdiri di posisi masyarakat pertanian. Heterogenitas tingkat kemajuan kultural itu menyebabkan ketidaksamaan pemahaman dalam melihat proses pembangunan.

Pilihan konsep pembangunan yang lebih bertumpu pada tingkat pertumbuhan bukan pemerataan, dengan asas *trickle down effect* ternyata hanya menimbulkan jurang ekonomi yang makin dalam. Walau berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional hingga sekitar 8% per tahun, namun tidak memiliki akar yang kuat. Kemiskinan dan pemiskinan terjadi di berbagai tempat, proyek IDT untuk mengentas kemiskinan tidak menyentuh substansi permasalahan. Jurang yang begitu dalam itulah yang sering memunculkan gesekan sosial, seperti kasus rasial di Solo awal tahun 1980-an di mana etnis Cina yang menguasai sebagian besar perekonomian diluluh-lantakkan oleh pribumi, hanya karena persoalan sepele.

## Penutup

Berbagai konflik dan kerusuhan di Indonesia bukan dipicu oleh faktor agama, tapi ada faktor lain, seperti ekonomi, arogansi kekuasaan dan ketidakadilan. Kerusuhan demi kerusuhan membuat kita kaget dan *miris*, karena terjadi pasca Soeharto lengser, dikhawatirkan hal ini akan memunculkan kesimpulan naif, bahwa kepemimpinan Soeharto lebih baik dan berhasil dalam meredam berbagai konflik di Indonesia. Sehingga --seperti dilakukan Gus Dur-- mengajak Soeharto kembali berkiprah untuk meredam konflik. Pemaknaan yang salah terhadap fenomena yang terjadi dikhawatirkan mampu menyeret kita pada kondisi pra reformasi, menghendaki munculnya orang kuat, *satrio piningit*, dan sejenisnya. Jika kondisi itu terjadi, akan menjadi ganjalan serius bagi upaya mewujudkan masyarakat madani.

Persoalan yang harus dilakukan bukanlah membangun kultus, melainkan membangun sistem politik yang bijak dan demokratis. Masa lalu Indonesia (38 tahun) merupakan suatu fase pengkultusan individu hingga berdampak pada ketidakmampuan rakyat mengaktualisasikan potensi diri. Ketentraman dan kedamaian yang dibangun dari kultus individu merupakan fatamorgana yang menyembunyikan letupan-letupan. Walaupun bisa disebut keberhasilan, Soekarno maupun Soeharto selama memerintah, berhasil menyatukan bangsa Indonesia dalam persatuan semu. Mereka berhasil memaksakan 'perbedaan palsu' untuk diterima dan dianggap keaneka-ragaman, sementara perbedaan perbedaan yang sesungguhnya masih seperti bara dalam sekam. Perbedaan yang dipaksakan dan persatuan semu, didukung oleh kekuasaan yang otoriter dan hegemonik, serta didukung kekuatan bersenjata, berhasil membuat keadaan

stabil. Persoalan SARA yang selalu dijadikan tameng untuk menghancurkan potensi oposisi ternyata cukup ampuh mengharu-biru ketakutan rakyat. Dalam konteks itu, stabilitas dan instabilitas hanyalah persoalan waktu.

Dan ternyata pasca Soeharto lengser, persoalan SARA (yang harusnya rahmat bagi bangsa Indonesia) menjadi momok dan terus menteror bawah sadar kita. Kita jadi ikut-ikutan latah menganggap suatu persoalan antar anak bangsa berbeda golongan atau agama, menjadi persoalan SARA. Seperti telah disinggung di atas, konflik agama mudah menumbuhkan solidaritas sesama, maka pemaksanaan menyebut konflik agama pada berbagai kerusuhan, menyiratkan adanya suatu kepentingan tertentu. Dalam konfigurasi politik yang sangat kompleks, dan kerentanan bangsa Indonesia karena himpitan ekonomi, *mainstream* tersebut hanya akan memperlemah persatuan, maka perlu upaya untuk menetralkan anggapan SARA tersebut, dengan mengembalikan makna spiritualitas agama.

Persoalan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia adalah membangun suatu sistem politik yang bijak dan adil serta demokratis. Dalam menuju fase tersebut, terjadi tarik-menarik antarberbagai kepentingan, termasuk dalam barisan kelompok *reformis*. Sebagian kelompok *reformis* menghendaki perubahan secara cepat, sedang yang lain lebih memilih gradual dan konstitusional. Kecenderungan itu sering memunculkan ketegangan politik. Oleh sebab itu format politik yang ideal harus segera dirumuskan, tanpa salinghujat.

Mewujudkan kehidupan politik yang bijak, adil dan demokratis itu terkadang memunculkan akses berupa gesekan-gesekan. Diperlukan kesadaran dan tanggung jawab semua komponen bangsa agar gesekan itu tidak

meruncing menjadi konflik. Cara yang bijak adalah melakukan integrasi kultural, yaitu upaya untuk mengakui, mengelola dan melakukan sinergi dari heterogenitas bangsa. Homogenisasi terbukti gagal karena mengingkari perbedaan yang ada. Maka integrasi kultural, selain mampu meredakan konflik juga akan tetap menjaga keutuhan bangsa. Integrasi kultural akan melihat dan menerima perbedaan kemajuan kultural yang terjadi dalam masyarakat sebagai sebuah keniscayaan, sehingga tidak ada lagi perlakuan diskriminatif baik terhadap wilayah, kelompok, maupun suku dan agama. Integrasi kultural terbukti (seperti pada awal kemerdekaan) dapat menjadi perekat dan tameng bangsa menghadapi ancaman disintegrasi baik karena dorongan dari dalam maupun rongrongan dari luar.

Agamawan harus berperan aktif mendorong terjadinya integrasi kultural untuk mengeliminir isu SARA, pluralitas agama di Indonesia yang sudah terbangun cukup lama jangan dinodai dengan ambisi politik segelintir orang. Agamawan harus menyadarkan umatnya bahwa agama adalah sistem pandangan hidup yang menawarkan makna dan tujuan hidup yang benar dan baik.<sup>14</sup> Segala ajakan yang tidak benar dan tidak baik, bukan saja tidak berdasar pada agama, tetapi bahkan menentang agama. Karena agama samawi memiliki kesamaan dalam memandang relasi sesama makhluk Tuhan. Kesamaan pandang dari berbagai keyakinan agama itu perlu dijadikan rumusan dalam membangun kebersamaan bangsa Indonesia, dengan menghilangkan kecurigaan-kecurigaan. Harus disadari pemaksaan *mainstream* untuk menyebut kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sebagai konflik SARA, bisa jadi mengandung muatan politis demi menggapai kekuasaan politik segelintir orang. Sudah saatnya agamawan mengajak umatnya untuk

bersama-sama membangun tingkat kesejahteraan hidup yang lebih baik. Dengan melakukan penafsiran empirik dan kontekstual dari ajaran agama. Sebagai contoh, dalam Islam dikenal istilah fardlu kifayah, dalam implementasinya sering diwujudkan dalam sholat jenazah, membalas salam dan sejenisnya yang bersifat normatif, belum empirik. Bisa saja fardlu kifayah diftafsirkan secara kontekstual sebagai penguasaan asset ekonomi dan kepemilikan faktor-faktor produksi, hingga umat Islam menjadi 'kuat' dan tidak mudah terombang-ambing. Spiritualitas agama harus dikembalikan sebagai penuntun keberagamaan. □

---

### Catatan Kaki

1. Lance Castles, *Kerusuhan yang Dikatakan 'Antar Umat Beragama'; Babilonkah, Armageddonkah atau Tanah Gosyen*, Makalah, Yogyakarta, 1999.
2. *Ibid*.
3. Sholeh UG SH, *Konsep Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Hukum*, Yogya Post, Selasa Pon, 9 Maret 1999.
4. Sholeh UG SH, *Kampanye Tanpa Pengerahan Massa, Mendagri Kurang Tegas*, Yogya Post, 24 Februari 1999.
5. Sandaran hukum yang sering dipakah adalah Al-Qur'an Surat 29:45, "*Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, dan ingat pada Allah itu lebih baik*". Juga bisa dirujuk dalam Surat 107:1-7.
6. Al-Qur'an 13:28, "*Mereka itu orang yang beriman, yang berhati tenang karena ingat kepada Allah. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang*".
7. Nurcholish, *Op. Cit*, hal. iii
8. Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Yayasan Wakaf Peramadina, Jakarta, 1992, hal. iv.
9. Lihat, Chaiwat Satha Anand, *Bulan Sabit Tanpa Kekerasan*, *Ibid*, hal. 106.
10. Mochtar Lubis (Peny), *Menggapai Dunia Damai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988, hal. xi.
11. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, Mizan, Bandung, 1991, hal. 168.
12. K. H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Mizan, Bandung, 1995, hl. 64.
13. Musa Asy'ari, *Mengapa Umat Beragama Saling Membunuh*, Makalah, 1999, hal. 2.
14. Nurcholish Madjid, *Op. Cit*, hal. 26.

